

DIPLOMASI ISLAM INDONESIA-TIONGKOK

Abid Rohman

State Islamic University of Sunan Ampel Surabaya, Indonesia
E-mail: abidabufida@gmail.com

Ridha Amaliyah

State Islamic University of Sunan Ampel Surabaya, Indonesia
E-mail: ridha.amaliyah@gmail.com

Abstract: This research aims to understand the influence of Islam in Indonesia-China public diplomacy perspective, to determine the roles of non-state actors, as well as to identify its opportunity and challenges. This research conducts a qualitative-descriptive approach. The researcher found that Islam influences both countries' public diplomacy in art and cultural field as well as public diplomacy practices. Admiral Cheng Hoo holds major roles in the spread of Islam that time. The roles of non-state actors are crucial when conducting people-to-people approach: as dialogue and cooperation partner, and as promotor. Both countries has enjoyed advantages being each other's partner in various fields. The role of promotor is beared mainly by Muhammadiyah and Nahdatul Ulama in disseminating the core value of Islam which is peace and justice. The opportunity in actualizing a sustainable cooperation between Indonesia-China is wide open in the near future due to the spirit of Belt and Road Initiatives. Meanwhile, the challenges are quite solid. The fact that Islam is minority in China and the lack of references leads to misperception among Chinese people; the domination of China in economy that are considered as a threat by most Indonesian people; the long-existed negative perception toward Indonesian-Chinese descendants; as well as Indonesia's double identity dilemma (pluralist and religious state) in formulating public diplomacy are several defiances that must be solved in achieving a harmonious relations between Indonesia and China.

Kata-kata Kunci: diplomasi publik; diplomasi agama; diplomasi Islam; Muhammadiyah; Nahdatul Ulama

Kerjasama diplomatik pemerintah Indonesia dan Tiongkok telah lama terjalin dan mengalami pasang surut hubungan selama lebih dari enam dekade. Hubungan kedua negara pada dasarnya sudah dibuka secara resmi pada tanggal 9 Juni 1950. Namun, peristiwa pemberontakan PKI pada tanggal 30 September 1965 berujung pada pembekuan hubungan diplomatik keduanya karena munculnya kecurigaan keterlibatan Tiongkok dalam peristiwa tersebut. Normalisasi hubungan dilaksanakan pada tahun 1990 setelah meninjau situasi kedua negara dan politik global yang membaik. Hubungan keduanya terus meningkat di bidang politik, ekonomi, sosial-budaya, dan memuncak dengan ditandatanganinya Deklarasi Kemitraan Strategis pada tahun 2005, yang kemudian ditingkatkan menjadi Kemitraan Strategis Komprehensif.

Dalam perkembangannya, keterbukaan dan modernitas yang ditunjukkan Tiongkok telah mendorong terciptanya kemitraan strategis yang lebih dalam antara Indonesia dan Tiongkok. Diplomasi yang dilakukan tidak hanya di bidang politik dan ekonomi, tetapi memanfaatkan sumber kekuatan baru yang dikenal luas dengan *soft power*. Hal ini dibuktikan oleh Tiongkok melalui diplomasi “*charm offensive*” yang sukses menjual daya tarik melalui budaya, sejarah, etos kerja, dan didukung oleh pengembangan secara ekspansif di bidang pendidikan dan penelitian. Selain itu, diplomasi panda adalah bentuk diplomasi *soft power* yang juga disebarluaskan oleh pemerintah Tiongkok. Bulan September 2017 lalu, Taman Safari Indonesia menerima kedatangan dua *giant panda* bernama Hu Chun dan Cai Tao. Peristiwa ini menjadi pertanda eratnya hubungan diplomatik Indonesia dengan Tiongkok selama beberapa tahun terakhir. Indonesia menjadi negara resmi ke-4 di Asia Tenggara dan negara ke-16 di dunia yang mendapatkan peminjaman pengembangbiakan (*breeding loan*) *Giant Pandas* dari Tiongkok.

Selain bermitra secara politik, ekonomi dan sosial-budaya, Indonesia dan Tiongkok terhubung karena sejarah eksistensi Islam di kedua negara. Pengaruh Islam di Indonesia, menurut beberapa ahli sejarah disebarluaskan melalui utusan-utusan Muslim Tiongkok yang datang ke Indonesia dalam pelayarannya pada awal abad ke-15. Utusan yang disebut luas dalam sejarah Indonesia adalah Laksamana Zheng He (Cheng Ho). Kesamaan sejarah sebagai Muslim telah menciptakan ikatan tersendiri bagi kedua negara. Dalam kunjungannya ke Tiongkok bulan Mei 2017 lalu, Presiden Joko Widodo mengunjungi Masjid Niujie di Beijing, masjid yang dahulu juga dikunjungi oleh Presiden Abdurrahman Wahid di tahun 1999.

Eksistensi hubungan diplomatik antara masyarakat Muslim di Indonesia dan Tiongkok telah lama terjalin, tetapi aktifitas tersebut masih terbatas dan belum menjadi prioritas kedua negara. Hal ini diakui oleh pemerintah Tiongkok yang membatasi *faith diplomacy* mereka. Meski begitu, peneliti melihat adanya potensi yang bisa digali dari kedua negara seiring dengan meningkatnya interaksi warga Muslim di kedua negara, begitu juga dorongan global untuk memanfaatkan *soft power* sebagai alat diplomasi dalam hubungan antarnegara sudah sangat nyata.

Penelitian ini bermaksud untuk melihat secara strategis sejauh mana kemajuan, tantangan, dan peluang hubungan diplomatik Indonesia-Tiongkok dalam konteks Islam sebagai diplomasi *soft power* kedua negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif. Penelitian ini akan memaparkan bagaimana pengaruh Islam dalam diplomasi publik Indonesia dan Tiongkok mempertimbangkan bahwa kedua negara terikat dalam sejarah penyebaran ajaran Islam; menentukan peran aktor non-negara yang terlibat aktif dalam diplomasi publik kedua negara; serta mengidentifikasi peluang dan tantangan yang harus dihadapi oleh kedua negara.

Diplomasi Publik

Menurut Barston, diplomasi terkait erat dengan pengaturan hubungan antara satu negara dan negara lainnya, maupun aktor internasional lainnya. Dari perspektif negara, diplomasi berhubungan dengan kegiatan memberi masukan, membentuk, dan melaksanakan kebijakan luar negeri.¹ Diplomasi juga berarti metode/cara yang dipakai aktor negara atau perwakilannya dan aktor lainnya dalam mengartikulasikan, mengkoordinasikan, dan melindungi kepentingan bersama yang lebih besar, menggunakan korespondensi, pembicaraan tertutup, saling menukar pandangan, lobi, kunjungan, ancaman dan kegiatan lainnya.

Diplomasi yang modern berkembang secara substansi dan dapat tercermin dalam beragam bentuk diplomasi, seperti ‘diplomasi minyak’ (*oil diplomacy*), ‘diplomasi olahraga’ (*sport diplomacy*), ‘diplomasi pengetahuan’ (*knowledge diplomacy*), dan ‘diplomasi transisi’ (*transition diplomacy*). Peneliti sendiri menyimpulkan bahwa diplomasi, secara luas, dapat didefinisikan sebagai instrumen/alat/strategi/metode/kebijakan luar negeri yang ditempuh suatu negara berdaulat untuk meraih kepentingan nasionalnya

melalui protokol dan prosedur diplomatik oleh utusan resmi, dengan cara yang damai (*peaceful means*). Bentuk diplomasi saat ini yang dianggap efektif dalam mencapai tujuan kepentingan nasional adalah diplomasi publik.

Dahulu diplomasi publik biasanya merujuk pada cara diplomatik di mana pemerintah menularkan nilai dan informasi yang positif terhadap publik luar negeri, menutup kekurangan dalam kognitif dan emosional antara masyarakat domestik dan luar negeri, meningkatkan saling pengertian, dan membentuk opini publik dari luar negeri melalui berbagai macam cara, termasuk pertukaran budaya dan berita media, dengan tujuan menyempurnakan citra internasional dan pengaruh negara serta mempromosikan kepentingan nasionalnya. Hal yang paling menarik dari diplomasi publik adalah "*direct contact with foreign publics rather than foreign government*".²

Secara tradisional, diplomasi publik dibagi menjadi tiga elemen: (1) pemerintah sebagai pemain; (2) publik luar negeri sebagai objek utama; (3) untuk tujuan mempengaruhi opini publik luar negeri dan memperbaiki citra suatu negara. Diplomasi publik dalam era globalisasi lebih memperhatikan dalam keragaman subyek dan sifat komunikasi dua arah, terutama dalam dialog dan kerjasama. Diplomasi publik menekankan "listening" daripada "monologue", mempromosikan "contact" daripada "target", melihat pola jaringan masyarakat daripada model hierarki negara, seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. Ini disebut sebagai diplomasi publik era baru atau diplomasi publik generasi kedua. Ini juga menandakan bahwa diplomasi publik dibawakan oleh publik, bukannya diplomasi publik yang menjadikan publik sebagai target.³

Sejak peristiwa 9/11 di Amerika Serikat kemudian diikuti oleh peristiwa Bom Bali di awal tahun 2000-an, banyak pengamat HI melihat adanya peningkatan keterkaitan isu hubungan internasional dengan isu agama. Diplomasi yang melibatkan isu agama sebagai sentral aktifitasnya telah menjadi kajian tersendiri di hubungan internasional abad 21. Agama telah menjadi faktor pengaruh yang signifikan bagi suatu negara dalam berinteraksi dengan negara lainnya. Meski banyak yang menilai agama adalah urusan teologi semata (Tuhan dan makhluknya), tetapi fakta membuktikan bahwa agama menjadi pengaruh dalam urusan politik global, termasuk dalam aktifitas diplomasi suatu negara.

Berkaca pada fenomena tersebut, para penggiat diplomasi melihat bahwa isu agama menempati isu krusial dalam hubungan internasional. Segala aktifitas diplomasi publik yang dikaitkan dengan isu agama seringkali

dinamakan diplomasi agama. Agenda inti diplomasi agama adalah adanya interaksi antara pemerintah, pihak swasta, organisasi agama, ataupun masyarakat luas dalam upaya mewujudkan kerukunan beragama ataupun upaya penyelesaian konflik berbasis agama.

Soft Power

Secara operasional, diplomasi publik akan selalu melibatkan sumber-sumber *soft power*. Joseph Nye Jr. menyatakan bahwa *soft power* adalah “*getting others to want the outcomes that you want without inducements (“carrots”) or threats (“sticks”)*.”⁴ *Soft power* ini sendiri melengkapai dua dimensi *hard power* suatu negara yakni militer (“*carrots*”) dan tekanan ekonomi (“*sticks*”) dimana *soft power* menjadi cara ataupun perilaku ketiga untuk mendapatkan hasil yang diinginkan, tanpa paksaan maupun iming-iming.

Tiga sumber utama dalam *soft power* yakni, daya tarik budayanya, nilai politik dan kebijakan luar negerinya. *Soft power* bergantung pada kemampuan membentuk kesukaan (*preferences*) satu pihak. Kemampuan untuk membentuk kesukaan (*preferensi*) ini seringkali dikaitkan dengan aset yang *intangible* seperti pribadi yang menarik, budaya, institusi dan nilai politik, dan kebijakan yang dianut.

Soft power bergantung pada kemampuan membentuk kesukaan (*preferences*) satu pihak. Para pemimpin politik telah menyadari pentingnya peran daya tarik (*attractiveness*). Pemimpin di negara demokrasi lebih memilih untuk memberikan komando dengan daya tarik, ketimbang pemimpin di negara yang otoriter. Kemampuan ini untuk membentuk kesukaan ini seringkali dikaitkan dengan aset yang *intangible* seperti pribadi yang menarik, budaya, institusi dan nilai politik, dan kebijakan yang dianut.

Diplomasi Agama (Faith Diplomacy) Tiongkok Sejarah Islam di Tiongkok

Ada perdebatan mengenai jalur dan waktu masuknya Islam ke Tiongkok. Beberapa sumber mencatat bahwa keberadaan Islam di negeri Tiongkok dipercaya muncul pada masa dinasti Tang yakni sekitar abad ke 7, tidak lama setelah agama Islam diproklamasikan Nabi Mohammad SAW.⁵ Islam dibawa oleh para pedagang yang datang ke Tiongkok melalui jalur darat dan laut. Dalam satu kisah dikatakan bahwa tahun 650 Masehi, Sa’ad

bin Abi Waqqas, paman Nabi Mohammad SAW, dikirim oleh Khalifah Usman bin Affan berkunjung ke kerajaan Tang untuk membangun hubungan diplomasi, yang mana hubungan tersebut dapat dibuktikan dari hadirnya masjid pertama di Guangzhou. Dari dinasti Tang ke dinasti Song, pedagang Muslim berangsur-angsur menetap di kota-kota pelabuhan dan pusat bisnis di Tiongkok, seperti Guangzhou, Quanzhou, dan Hangzhou, di mana mereka banyak mendirikan masjid.⁶ Kedatangan Islam ke Tiongkok merupakan produk sampingan dari perdagangan dan ikatan diplomatik Tiongkok-Arab semasa dinasti Tang dan dinasti Song.

Kitab suci yang dibawa oleh Sa'ad bin Abi Waqqas diserahkan sebagai hadiah kepada kaisar Dinasti Tang saat itu. Meski tidak ditolak, dakwah Islam tidak langsung diterima. Kaisar memerintahkan agar ajaran Islam diselidiki. Setelah mengetahui bahwa ajaran Islam dirasa tidak jauh berbeda dengan ajaran Konfusianisme maka Sa'ad bin Abi Waqqas mendapat ijin mengembangkan ajaran Islam di Guangzhou. Walau tidak memeluk Islam, Kaisar tidak melarang rakyatnya bila ingin masuk Islam.⁷ Kaisar juga memberi izin untuk membangun masjid di wilayahnya. Masjid itu dikenal dengan Masjid Huaisheng atau dikenal dengan *Lighthouse Mosque* atau *the Great Mosque of Canton*. Masjid itu juga disebut sebagai Masjid Memorial yang merupakan masjid pertama di daratan Tiongkok.⁸

Di Tiongkok, Sa'ad bin Abi Waqqas tidak hanya menyebarkan agama Islam. Ia juga memperkenalkan kondisi Arab dan perkembangan Islam di Arab pada masa itu. Mereka juga mendapat pengetahuan soal kondisi Tiongkok dan perkembangan ekonomi, agama dan kebudayaan yang disebut menjadi salah satu perhatian Nabi Muhammad SAW semasa hidup.⁹ Perbedaan catatan sejarah tersebut baiknya tidak menjadi perbebatan, karena hal yang lebih penting adalah fakta bahwa Islam telah lama masuk ke Tiongkok dan diterima dengan baik, maka hubungan baik tersebut harus dipelihara oleh umat Muslim Indonesia dan Tiongkok.

Penerimaan yang baik dari dinasti Tang dan dinasti Song terhadap Islam membuat para minoritas Muslim dapat hidup dan bertahan di bawah lingkungan dan aturan non-Islami. Meski ideologi dan kepercayaan mayoritas di Tiongkok adalah Konfusianisme, Buddhisme, dan Daoisme, kelompok minoritas Muslim memposisikan diri mereka bukan sebagai ancaman terhadap eksistensi ideologi mayoritas tersebut. Hal ini tidak terlepas dari status mereka yang kebanyakan adalah pedagang kaya raya dari Arab dan Persia sehingga memiliki pengaruh dan jejaring perdagangan yang baik dengan para pedagang Tiongkok setempat dan pedagang asing lainnya.

Mereka berkontribusi besar menjadikan Tiongkok sebagai pelabuhan pusat perdagangan.¹⁰

Seperti agama lainnya, Islam mendapatkan tekanan dari pihak ultra-kiri Tiongkok selama beberapa dekade. Pemerintah Tiongkok baru mengizinkan kaum Muslim Tiongkok melaksanakan haji pada tahun 1979, dengan jumlah peserta yang terbatas pada awalnya. Tetapi setelah strategi *soft power* dilaksanakan beberapa tahun terakhir, pemerintah Tiongkok memperbolehkan lebih banyak jumlah kaum Muslim Tiongkok berhaji. Tiongkok sepertinya masih berhati-hati menggunakan Islam dalam diplomasi agamanya. Inisiatif ini bersifat terbatas pada daerah-daerah bisnis dan provinsi yang memiliki sejumlah besar populasi Muslim Tiongkok, seperti di Daerah Khusus Ningxia Hui, Yunnan, Gansu, and Daerah Khusus Xinjiang Uygur.¹¹

Pada tahun 2001, Presiden Jiang Zemin mengakui untuk pertama kalinya bahwa agama dapat berperan sebagai stabilisator dalam masyarakat dan dapat dimobilisasi sebagai pendorong pembangunan nasional. Agama telah berperan positif dan berkontribusi menciptakan harmoni atau keseimbangan masyarakat luas Tiongkok. Tokoh elit agama dan pejabat negara mulai memikirkan bagaimana mengatur agama secara institusional, maka tidak heran pemerintah Tiongkok mempertimbangan agama sebagai sumber diplomatik.

Tujuan dari diplomasi agama (*faith diplomacy*) Tiongkok adalah untuk mempromosikan pemahaman dan penerimaan kebijakan agama pemerintah Tiongkok secara internasional, mengadvokasi kegiatan-kegiatan keagamaan, meningkatkan citra Tiongkok, dan “membangun dunia yang harmonis”. Slogan terakhir tersebut jelas diadaptasi dari slogan domestik negara tersebut, “membangun masyarakat yang harmonis”. Dengan tujuan ambisius tersebut, pemerintah Tiongkok telah menginisiasi berbagai macam diplomasi agama dalam beberapa tahun belakangan, dan momentum tersebut berlanjut hingga sekarang.

Diplomasi Islam Tiongkok ke Indonesia (Nusantara)

Awal mula peran orang-orang Tiongkok dalam menyebarkan agama Islam di Nusantara adalah ketika ekspedisi Cheng Hoo terutama di Jawa dan Sumatera. Cheng Hoo yang merupakan duta resmi Dinasti Ming ini disebut memiliki peran besar dalam penyebaran agama Islam ketika itu. Selama

perjalanannya ia menyebarkan berita tentang kemakmuran Tiongkok di negeri yang dikunjungi. Ketika pulang ke negerinya, ia membawa hadiah dari berbagai negara untuk disampaikan kepada kaisar berupa perhiasan, busana, hingga hewan langka, yang tidak ada di Tiongkok.¹¹

Selain itu, peran muslim Tionghoa untuk menyebarkan agama Islam di Nusantara tak terlepas dari sembilan Wali Songo, yang mana terdapat empat dari sembilan Wali merupakan orang Tionghoa, seperti yaitu Sunan Ampel, Sunan Bonang (anak dari Ampel dan seorang wanita Tiongkok), Sunan Kalijaga, dan Sunan Gunungjati. Selain menyebarkan agama Islam, etnis Tiongkok ini juga diberi wewenang untuk menjalankan bandar atau pelabuhan laut di Semarang dan Lasem untuk melumpuhkan bandar-bandar laut yang masih dikuasai sisa-sisa Singasari dan Majapahit. Selain itu juga, penyebaran islam di kerajaan Mojopahit dilakukan dengan cara pernikahan antara orang Tionghoa dengan anggota kerajaan.¹²

Jejak-jejak kebudayaan Tiongkok dan Tionghoa muslim juga cukup banyak bertebaran di Indonesia. Mulai dari bahasa, arsitektur, konsepsi spiritual dan keduniaan, nama-nama jalan, aneka aksesoris pakaian hingga nama makanan.¹³ Bahkan berdasarkan penelitian Sumanto Al-Qurtubi ditemukan fakta bahwa eksistensi Muslim Tionghoa pada awal perkembangan Islam di Jawa tidak hanya ditunjukkan dengan adanya kesaksian-kesaksian pengelana asing, sumber-sumber Tiongkok, teks lokal Jawa maupun tradisi lisan saja, melainkan juga bukti peninggalan purbakala islam di Jawa seperti adanya ukiran padas di Masjid kuno mantingan Jepara, menara masjid Tiongkok di Banten, arsitektur keraton Cirebon beserta taman sunyaragi dan berbagai peninggalan kuno lainnya.¹⁴ Ada juga bukti sejarah seperti motif relief di Candi Sewu Yogyakarta diduga mendapat pengaruh dari motif-motif kain sutera Tiongkok. Batik Cirebon yang menampilkan hewan kahyangan dalam mitologi Tionghoa. Selain itu juga terdapat wayang yang merupakan hasil dari akulturasi antara budaya Tiongkok dan Jawa, seperti wayang potehi dan wayang kulit Tiongkok-Jawa.¹⁵ Bahkan hari ini yang jelas terlihat adalah pembangunan masjid Cheng Hoo di berbagai kota besar di Indonesia yaitu sekitar 13 Masjid Cheng Hoo sebagai simbol Islam Tionghoa dengan arsitektur bangunan masjid khas etnis Tionghoa. Seperti masjid Cheng Ho di Surabaya, Pasuruan, Malang, Jember, Palembang, Jakarta, Sumatera, Kalimantan dan lain sebagainya.¹⁶

Hubungan erat antara Muslim Tionghoa dan Nusantara terus berlanjut sampai hari ini. Mantan Presiden sekaligus ulama besar Nahdlatul Ulama, Abdurrahman Wahid, akrab disapa Gus Dur, pernah menyatakan dirinya

sebagai keturunan Tionghoa tulen. Begitu juga dari sisi Muhammadiyah, Din Syamsuddin pernah mengatakan dalam sebuah pidato bahwa figur Karim Oei, pendiri Yayasan H. Karim Oei (YHKO) bukanlah orang asing di tubuh Muhammadiyah. Dia pernah menjadi konsul Muhammadiyah di Bengkulu, bahkan bersahabat dengan Buya Hamka, tokoh Muslim Indonesia.¹⁷

Poin kerjasama antar-warga diwujudkan dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan sektor strategis lainnya. Kaitannya dengan diplomasi Islam, Tiongkok telah menunjukkan posisinya sebagai mitra dialog utama bagi Indonesia. ini dibuktikan dengan telah banyaknya dialog, kerjasama, maupun kunjungan pimpinan dan tokoh agama Indonesia ke Tiongkok. Bulan September 2018 misalnya, pemerintah Tiongkok mengundang pimpinan pusat Muhammadiyah untuk berkunjung dan melakukan dialog terkait peningkatan kerjasama Indonesia-Tiongkok, khususnya di bidang pendidikan dan kebudayaan. Rombongan yang dipimpin oleh Ketua PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, mengagendakan pertemuan dengan Rektor Universitas Tsinghua, pimpinan Confucius Institute, dan kunjungan Rumah Sakit Xiehe. Selain itu, rombongan juga berdialog dengan Asosiasi Islam Tiongkok dan Institut Islam Tiongkok.¹⁸

Begitu juga dengan upaya diplomasi Nahdatul Ulama. Lima tokoh senior Nahdatul Ulama diundang untuk datang di Tiongkok tahun 2016 dengan tujuan upaya luas Beijing untuk membuktikan kepada para pemimpin Muslim Indonesia bahwa Muslim Uighur di Tiongkok menikmati kebebasan beragama.. Nahdatul Ulama dan Tiongkok sering melakukan pertemuan dan telah melakukan beberapa kesepakatan seperti di bidang pendidikan seperti pertukaran pelajar dan bekerjasama untuk membangun sarana air bersih.¹⁹ Di bulan Mei 2018, Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia, Xiao Qian, melakukan kunjungan sekaligus memberikan santunan kepada anak yatim di pesantren KH Said Aqil Siroj. Xiao Qian menyatakan bahwa Tiongkok memberikan beasiswa tahun 2018 sebanyak 13 dosen kuliah di Tiongkok, jurusan teknologi sistem informasi, komputer, teknik informatika dan lain-lain. Begitu juga dengan program tukar menukar pelajar.²⁰

Selain dengan organisasi massa Islam, dialog antar-warga Indonesia-Tiongkok juga terbangun dari komunitas muslim Tionghoa di Indonesia, misalnya komunitas yang tergabung dalam Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI). Lembaga yang didirikan pada tahun 1961 ini merupakan wadah aspirasi bagi masyarakat Muslim keturunan Tionghoa di Indonesia.

Ketua Umum PITI Jawa Timur, Haryanto Satriyo, mengungkapkan fakta bahwa meski pada awal pendiriannya tidak selalu mulus karena adanya pertentangan dari beberapa elemen masyarakat, khususnya pada era Orde Baru, tetapi perubahan terjadi dan penerimaan masyarakat luas terhadap PITI telah dirasakan pada era Reformasi.²¹

PITI Jawa Timur yang dibangun tahun 1988 tidak hanya berkontribusi besar dalam membentuk kerukunan antar-umat beragama di Jawa Timur, tetapi juga dalam menciptakan komunikasi yang baik antara masyarakat Muslim Indonesia dengan masyarakat Muslim Tiongkok. Oleh karena itu, kontribusi ini diapresiasi penuh oleh pemerintah Tiongkok melalui Konsulat Jenderal Tiongkok di Surabaya. Dukungan tersebut terhadap PITI Jawa Timur disampaikan berupa kerjasama berkelanjutan.²²

Diplomasi Agama (Faith Diplomacy) Indonesia

Sejarah Islam di Indonesia

Agama di Indonesia memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Hal ini dinyatakan dalam ideologi bangsa Indonesia, Pancasila: "Ketuhanan Yang Maha Esa". Penerapan agama di Indonesia berpengaruh secara kolektif terhadap politik, ekonomi, dan budaya. Dalam UUD 1945, pemerintah menyatakan bahwa "tiap-tiap penduduk diberikan kebebasan untuk memilih dan mempraktikkan kepercayaannya" dan "menjamin semuanya akan kebebasan untuk menyembah, menurut agama atau kepercayaannya".

Sejarah awal agama Islam di Indonesia, dipengaruhi oleh faktor perdagangan internasional. Kemungkinan besar para pedagang Muslim dari berbagai negara telah ada di wilayah maritim Asia Tenggara sejak periode awal Islam. Sumber-sumber paling awal melaporkan bahwa sejumlah penduduk asli telah memeluk agama Islam sejak awal abad ke-13. Hal ini dibuktikan dari batu-batu nisan yang mengindikasikan keberadaan sebuah kerajaan Muslim di Sumatra Utara pada tahun 1211. Di abad ke-15 dan selanjutnya, kerajaan-kerajaan dan kesultanan-kesultanan Islam menjadi kekuatan politik dominan di Indonesia, meskipun mereka kemudian dikalahkan oleh para pendatang baru dari Eropa (Portugis dan Belanda) di abad ke-16 dan abad ke-17. Penyebaran Islam di Indonesia baiknya tidak dipandang sebagai proses yang cepat dan berasal dari satu sumber saja, namun lebih tepat disebut sebagai proses dari berbagai gelombang Islamisasi yang berkaitan dengan perkembangan internasional dalam dunia Islam;

sebuah proses yang terus berlanjut bahkan hingga saat ini. Dua gelombang reformasi penting yang bertujuan untuk mengembalikan kemurnian Islam (ajaran pada masa Nabi Muhammad SAW) adalah gerakan Wahabi dan Salafi. Gerakan Wahabi datang dari Arab dan memberikan pengaruh di wilayah kepulauan ini sejak awal abad ke-19. Gerakan Salafi datang dari Mesir pada akhir abad ke-19. Kedua gerakan ini memiliki dampak yang kuat dalam proses penyebaran agama Islam ortodoks di wilayah kepulauan ini.

Kendati begitu, gelombang-gelombang Islamisasi juga menyebabkan ketegangan dan perpecahan di dalam komunitas Islam Indonesia karena tidak semua orang setuju dengan kedatangan gerakan Islam ortodoks. Perbedaan ini masih tampak dalam dua organisasi Islam yang paling berpengaruh di Indonesia pada saat ini. Muhammadiyah, sebuah organisasi sosial yang didirikan pada tahun 1912 di Jawa, mewakili komunitas Islam modernis yang menolak Islam Jawa yang mistis (tradisional). Pada saat ini, kelompok ini memiliki sekitar 30 juta anggota. Sebagai reaksi atas pendirian Muhammadiyah, para pemimpin tradisional Jawa mendirikan Nahdlatul Ulama (NU) pada tahun 1926. Para anggota Nahdlatul Ulama masih dipengaruhi oleh elemen-elemen mistis sebelum kedatangan agama Islam. Jumlah anggotanya saat ini mencapai 40 juta orang.²³

Diplomasi Islam Indonesia ke Tiongkok

Presiden Jokowi pernah berkunjung ke masjid Niuji di Beijing pada tahun 2017 lalu, mengikuti jejak presiden pendahulunya, Abdurrahman Wahid alias Gus Dur di tahun 2000. Kunjungan yang dilakoni Jokowi di sela-sela menghadiri KTT Kerja Sama Internasional Jalur Sutra dan Sabuk Maritim Baru (*New Belt and Road Forum*) itu tidak hanya untuk mempererat hubungan Indonesia-Tiongkok dalam sektor ekonomi, melainkan juga antarmasyarakat kedua negara, khususnya umat Islam.²⁴ Indonesia berkepentingan mempromosikan nilai Islam Indonesia, maka Presiden Jokowi menawarkan program kerja sama untuk pendidikan keislamaan dan beasiswa bagi warga Muslim Tiongkok yang ingin belajar di pondok-pondok pesantren yang dikenal berperan besar melahirkan ulama-ulama Nusantara dan berpemahaman Islam *rahmatan lil 'alamin*.²⁵

Islam Indonesia yang terwakili oleh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah memang telah banyak berperan dalam kemajuan negara. Salah satunya diplomasi dengan negara tirai bambu, Tiongkok. Salah satu

cara yang dilakukan oleh NU dan Muhammadiyah adalah dengan membentuk Cabang Istimewa NU dan Muhammadiyah di Tiongkok. Begitu juga Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah (PCIM) yang dilantik oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang diwakili oleh Bendahara Umum Suyatno pada tahun 2018.

Keberadaan masyarakat Muhammadiyah yang tersebar di berbagai negara seperti di China juga turut mengukuhkan hubungan antara Indonesia-Tiongkok. Sebelumnya di tahun 2017, mantan Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia Xie Feng mengunjungi Kantor Pimpinan Muhammadiyah yang bertemu langsung dengan Ketua Umum Muhammadiyah, Haedar Nashir, untuk membahas perkembangan Islam di Tiongkok serta tertarik untuk mengenal Islam Indonesia yang dikenal moderat salah satunya yakni Muhammadiyah.

Pertemuan tersebut menghasilkan suatu kerjasama baik di bidang kesehatan, pendidikan serta kebudayaan yang diharapkan akan menguntungkan kedua belah pihak. Tiongkok begitu terinspirasi oleh ideologi Islam Berkemajuan Muhammadiyah yang memiliki visi dan misi mencerdaskan dan mensejahterakan masyarakatnya di segala bidang khususnya dibidang keagamaan, pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan perempuan.²⁶

Sama halnya dengan Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama pun berkontribusi aktif dalam melakukan diplomasi Islam ke negeri panda, yakni dengan memberi kesempatan beasiswa dan membuka cabang istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU) Tiongkok. KH Said Aqil Siroj menyatakan kesiapan NU memberikan beasiswa kepada sepuluh siswa-siswi terbaik Kunming Islamic College untuk belajar di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) Jakarta. Masyarakat Muslim di Yunnan mengartikulasikan Islam secara lebih inklusif. PCINU Tiongkok ini telah diikuti lebih dari 250 mahasiswa NU Indonesia. Pembentukan cabang ini didasari akan semangat menebarkan nilai-nilai Islam Indonesia yang bersifat moderat.²⁷

Pengaruh Islam dalam Diplomasi Indonesia-Tiongkok Seni dan Budaya

Islam masuk ke Nusantara dengan cara damai sehingga mudah diterima masyarakat lokal saat itu. Islam dari Tiongkok dibawa ketika ekspedisi Cheng Hoo terutama di Jawa dan Sumatera. Cheng Hoo yang merupakan duta

resmi Dinasti Ming ini disebut memiliki peran besar dalam penyebaran agama Islam ketika itu. Jejak-jejak kebudayaan Tiongkok dan Muslim Tionghoa juga cukup banyak bertebaran di Indonesia, mulai dari bahasa, arsitektur, konsepsi spiritual dan keduniaan, nama-nama jalan, aneka aksesoris pakaian hingga nama makanan, serta bukti peninggalan purbakala Islam di Jawa, misal ukiran padas di Masjid kuno mantingan Jepara, menara masjid Tiongkok di Banten, arsitektur keraton Cirebon beserta taman sunyaragi dan berbagai peninggalan kuno lainnya. Bukti sejarah lainnya adalah motif relief di Candi Sewu Yogyakarta yang diduga mendapat pengaruh dari motif-motif kain sutera Tiongkok. Batik Cirebon yang menampilkan hewan kahyangan dalam mitologi Tiongkok. Selain itu juga terdapat wayang yang merupakan hasil dari akulturasi antara budaya Tiongkok dan Jawa, seperti wayang potehi dan wayang kulit Tiongkok-Jawa. Bahkan hari ini yang jelas terlihat adalah pembangunan masjid Cheng Hoo di berbagai kota besar di Indonesia yaitu sekitar 13 Masjid Cheng Hoo sebagai simbol Islam Tionghoa dengan arsitektur bangunan masjid khas etnis Tionghoa, seperti masjid Cheng Ho di Surabaya, Pasuruan, Malang, Jember, Palembang, Jakarta, Sumatera, Kalimantan dan lain sebagainya. Dari bukti peninggalan sejarah yang telah disebutkan di atas, peneliti memahami bahwa diplomasi agama Tiongkok, dalam hal ini adalah agama Islam, masuk ke Indonesia tidak dengan menempatkan Islam sebagai aset teologi tetapi sebagai aset budaya.

Praktik Diplomasi

Islam yang dibawa ke Tiongkok dan dari Tiongkok memberi pengaruh besar dalam konteks diplomasi publik. Nilai religius, ajaran, ibadah, dan cara hidup yang dibawa oleh para pedagang dan saudagar untuk berdagang ke suatu wilayah ternyata membawa perubahan dalam cara pandang maupun cara masyarakat bersosialisasi dengan sesama, begitu juga dengan kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya. Menurut Melissen, diplomasi yang dikerjakan oleh para aktor non-negara justru sudah dilakukan oleh masyarakat di peradaban kuno dengan mengirim utusan dan saling menyampaikan informasi.²⁸ Praktik awal diplomasi publik ini bahkan telah ada sebelum konsep negara bangsa dicetuskan dalam Perjanjian Westphalia tahun 1648. Maka, koneksi antara dinasti Tiongkok dan para pedagang Muslim Arab dan Persia dapat dijadikan contoh bahwa bahkan diplomasi bisa dilakukan dari utusan non-negara, seperti pedagang dan saudagar.

Islam tidak dipandang sebagai ancaman karena disampaikan melalui jalur budaya. Pembawa agama Islam di Tiongkok, Abi Waqqas, memang diterima oleh Kaisar Tiongkok saat itu, namun ajaran Islam tidak langsung diterima oleh sang kaisar. Setelah melalui proses penyelidikan dan dirasanya sesuai dengan ajaran Konfusius, barulah kaisar memberi izin untuk menyebarkan Islam. Ini berarti bahwa Islam tidak dilihat sebagai ajaran yang hendak menghapus atau mendominasi ajaran keyakinan yang sudah ada. Meski Kaisar sendiri tidak memeluk Islam, namun Abi Waqqas dan sahabat-sahabatnya tetap diizinkan menyebarkan agama Islam di Guangzhou. Kaisar juga memberi izin untuk membangun masjid di wilayahnya. Tidak hanya menyebarkan agama, Abi Waqqas juga memperkenalkan kondisi daratan Arab dan perkembangan Islam di Arab pada masa itu.

Diplomasi agama tidak menampik pentingnya diplomasi tradisional yang dilakukan oleh para pejabat negara, tetapi seringkali mereka tidak dapat menjamin keberlangsungan proses damai yang diciptakan.²⁹ Maka, dalam hal ini pihak aktor pemerintah perlu berkomunikasi agar tercipta sinergi yang baik. Hal inilah yang dilakukan pemerintah Indonesia pada era kepemimpinan Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Dalam satu kesempatan, Gus Dur pernah menyatakan bahwa dirinya adalah keturunan Tionghoa tulen. Saat memimpin, ia memfasilitasi kebutuhan para keturunan Tionghoa yang telah lama tinggal di Indonesia tanpa memandang agama yang diyakininya.

Diplomasi agama yang dilakukan pemerintah Indonesia maupun pemerintah Tiongkok sama-sama bertujuan untuk tidak hanya membangun citra yang baik melalui penyebaran nilai-nilai perdamaian, keadilan, dan harmoni antar sesama umat beragama tetapi sebagai bentuk upaya aktor negara dan non negara menyampaikan identitas dirinya dalam pergaulan internasional.³⁰ Hal itulah yang menjadi spirit diplomasi publik masyarakat Indonesia dan Tiongkok.

Peran Aktor Non-negara dalam Diplomasi Islam Indonesia-Tiongkok

Mitra Dialog dan Kerjasama

Dalam diplomasi publik yang menekankan adanya interaksi antara masyarakat domestik suatu negara dengan masyarakat global, keterlibatan aktor non-negara menjadi krusial. Aktor non-negara terdiri dari perusahaan multi nasional, organisasi pemerintah internasional, organisasi non-pemerintah internasional, kejahatan transnasional terorganisasi, jaringan

teroris internasional,³¹ media massa, kelompok kepentingan, kelompok keagamaan dan kelompok diaspora.³² Maka, organisasi massa seperti Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama, serta PITI Jawa Timur menjadi bagian penting bagi tercapainya tujuan diplomasi publik ini.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah beberapa kali diundang pemerintah Tiongkok untuk berkunjung dan melakukan dialog terkait peningkatan kerjasama Indonesia-Tiongkok, khususnya di bidang pendidikan dan kebudayaan. Mereka berkunjung ke universitas, rumah sakit, dan kantor pusat Confucius Institute di sana. Kunjungan terbaru telah dilakukan rombongan PP Muhammadiyah pada bulan September 2018. Menteri Urusan Administrasi Agama Republik Rakyat China, Wang Zuo An, yang menemui rombongan menyampaikan ketertarikannya untuk bekerjasama dengan Muhammadiyah karena andilnya dalam menciptakan kondisi keagamaan di Indonesia yang damai dan harmoni, begitu juga dengan pengalaman membangun tradisi agama dan pengelolaan haji.³³ Selain bidang agama, Muhammadiyah juga bekerjasama dengan institusi pendidikan di Tiongkok. Muhammadiyah diminta untuk menyebarkan nilai budaya Islam yang moderat dan toleran kepada masyarakat Tiongkok, baik melalui pengiriman mahasiswa maupun melalui cabang istimewa di Tiongkok.

Pimpinan pusat Nahdatul Ulama pun sering melakukan pertemuan di Tiongkok dan telah melakukan beberapa kesepakatan seperti di bidang pendidikan seperti pertukaran pelajar dan bekerjasama untuk membangun infrastruktur dan sarana kebersihan seperti penyediaan air bersih. Semisal agenda perjalanan pimpinan Nahdatul Ulama mengunjungi masjid bersejarah Youngning. Masjid ini merupakan salah satu masjid yang dibangun pada masa Dinasti Ming sekaligus masjid yang pertama kali membuka madrasah untuk tingkat pemula (*madrasah ibtidaiyyah*). Dari sekolah inilah kemudian lahir para ulama yang menyebar di daratan Tiongkok. Upaya diplomasi lain adalah dengan membuka cabang istimewa Nahdatul Ulama (PCINU) Tiongkok. PCINU Tiongkok ini telah diikuti lebih dari 250 mahasiswa NU Indonesia. Pembentukan cabang ini didasari akan semangat menebarkan nilai-nilai Islam Indonesia yang bersifat moderat.

Kunjungan serupa pun pernah dilakukan pihak Tiongkok. Sejumlah anggota delegasi dari Komisi Etnik dan Agama serta Asosiasi Islam China, Guangdong, Tiongkok pernah mendatangi kantor pusat PBNU di Jakarta untuk mempererat hubungan kerja sama. Pertemuan tersebut juga

membicarakan tentang keterikatan antara ulama di Tiongkok dan Indonesia terkait dengan struktur keilmuan.

PITI Jawa Timur dan Yayasan Haji Muhammad Cheng Hoo Indonesia tidak bisa dipisahkan dari mitra dialog dan kerjasama negeri Tiongkok. Masing-masing pihak telah sepakat untuk menciptakan suatu kerjasama berkelanjutan demi terciptanya kondisi masyarakat yang harmoni di Jawa Timur, misal saat terjadi gempa di Palu dan bencana di Pulau Sapudi, pihak PITI Jawa Timur, Yayasan Haji Muhammad Cheng Hoo Indonesia, serta Konsulat Jendral Tiongkok di Surabaya, mengadakan pengumpulan dana. Kegiatan yang juga menandai 16 tahun berdirinya Masjid Cheng Hoo ini sangatlah didukung oleh Konsulat Jendral Tiongkok di Surabaya yang melihat bahwa keberadaan Masjid Cheng Hoo telah memberi keharmonian bagi masyarakat Indonesia tidak hanya bagi masyarakat etnis Tionghoa, melainkan kepada semua etnis di Indonesia.

Promotor

Aktor non-negara juga berperan besar sebagai promotor. Dalam konteks diplomasi Islam, Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama memegang peranan krusial dalam mengakomodasi kepentingan Indonesia dan Tiongkok sekaligus. Peran promotor ini telah dijalankan dengan baik oleh kedua organisasi massa ini.

Dalam kunjungannya ke Tiongkok, utusan Nahdatul Ulama memperkenalkan tentang konsep Islam Moderat di Indonesia yang menitikberatkan pada pendidikan akhlak yang pada akhirnya dapat menjadi cara yang tepat untuk mencegah ekstrimisme. Sejatinya para pimpinan Tiongkok yang meyakini paham komunisme menguatirkan bila agama akan menjadi kendaraan bagi masuknya paham asing dan berujung bagi tumbuhnya kesetiaan yang salah arah yakni kesetiaan kepada Tuhan, bukan terhadap negara. Nahdatul Ulama yang berkontribusi menyebarkan model Islam yang ramah, toleran, dan moderat di Indonesia, sekaligus menyatakan keinginannya untuk belajar.

Keinginan Tiongkok untuk memahami lebih dalam tentang Islam tidak lepas dari peran kepemimpinan organisasi Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama untuk menjadi promotor nilai-nilai Islam yang damai. Hal yang paling diwaspadai oleh Tiongkok adalah tumbuhnya potensi perlawanan terhadap otoritas moral negara, terutama yang datang dari pihak luar. Maka, agama dan ajaran asing lainnya kerap mendapatkan tekanan dari pihak pemerintah

Tiongkok. Adanya konflik antara Muslim Tiongkok dengan masyarakat non-Muslim Tiongkok di Urumqi tahun 2009 membuat pemerintah Tiongkok memperketat aturan beribadah bagi Muslim Uighur di Daerah Khusus Xinjiang. Fakta ini yang membawa keprihatinan bagi masyarakat Muslim di Indonesia dan menumbuhkan rasa solidaritas untuk membantu mencari solusi jangka panjang yang komprehensif.

Agar dapat menemukan solusi tersebut, umat Muslim Tiongkok butuh pihak ketiga yang bisa menjadi referensi dan memiliki pengalaman mengelola pola relasi antara agama dengan negara. Pemerintah dan masyarakat Tiongkok pada umumnya perlu mendapatkan pengetahuan dan informasi yang tepat bahwa keberadaan kaum beragama sejatinya bisa menjadi soko guru bagi tegaknya negara, dan bukan sebaliknya. Warga Muslim Uighur bukanlah ancaman bagi keutuhan negara Tiongkok.

Melalui diplomasi agama dan pendekatan dialog *people-to-people*, kedua negara sama-sama diuntungkan karena pendekatan ini telah terbukti lebih efektif mendekatkan masyarakat kedua negara. Kedekatan ini kemudian menumbuhkan rasa saling pengertian dan komunikasi yang baik. Ini merupakan sinyal yang baik mengingat hubungan kedua negara mengalami pasang surut karena pengalaman sejarah masa lalu yang kurang baik. Pendekatan ketokohan dan dialog antar institusi masyarakat dapat mengurangi tensi, kecurigaan dan muatan politik ekonomi yang sering muncul bila pertemuan serupa dilakoni oleh aktor negara alias elit politik.

Peluang dan Tantangan dalam Diplomasi Islam Indonesia-Tiongkok

Peluang

Diplomasi agama yang selama ini dilakukan kedua negara bisa ditingkatkan dengan memperkuat kerjasama di berbagai bidang, khususnya sosial budaya dan pendidikan. Indonesia dan Tiongkok sama-sama memprioritaskan elemen religiusitas sebagai alat mencapai tujuan dan kepentingan nasional masing-masing. Maka, ketiga prioritas bidang tersebut layak diperjuangkan.

Demi mencapai kerjasama yang berkelanjutan maka baik Indonesia dan Tiongkok harus menyusun suatu kerangka komprehensif. Hal ini perlu dibicarakan mengingat kerjasama sosial budaya dan pendidikan belum sepenuhnya terintegrasi dengan semangat *One Belt and Road Initiative* yang saat ini sedang digalakkan oleh pemerintah Tiongkok. Maka, segala usaha

kerjasama kedua negara hendaknya mengarah untuk terwujudnya ide besar tersebut.

Dalam konteks diplomasi Islam, kesepahaman antara masyarakat Indonesia dan Tiongkok sangatlah penting karena sejatinya semangat yang diusung oleh Jalur Sutra Baru adalah bersatunya tidak hanya wilayah melalui pembangunan infrastruktur sehingga jarak tidak lagi menjadi halangan, tetapi terjalannya komunikasi antara negara-negara dalam kawasan jalur tersebut. Maka, intensitas hubungan antarwarga kedua negara harus terus ditingkatkan. Bila selama ini ada stigma negatif dari masyarakat mengenai kedua belah pihak, maka pendekatan *people-to-people* melalui bidang budaya dan pendidikan diharapkan akan mengeliminasi kesalahpahaman opini masyarakat di kedua negara.

Pendekatan yang dimaksud adalah dengan mengenalkan Islam tidak dalam perspektif teologi, tetapi dalam perspektif budaya. Pendekatan inilah yang sudah terbukti dapat memenangkan hati dan menerima dengan damai suatu ajaran asing. Peluang ini harus dapat dimanfaatkan dengan baik mengingat keduanya adalah negara yang kaya akan nilai budaya dan akar norma tradisional.

Dengan terpeliharanya hubungan baik kedua negara melalui pendekatan *people-to-people*, maka hal ini akan membawa hasil yang positif pula terhadap bidang-bidang yang lain seperti ekonomi, sosial dan budaya. Sistem keterbukaan yang telah dilaksanakan Tiongkok beberapa dekade terakhir telah berhasil meyakinkan masyarakat global bahwa Tiongkok telah berubah.

Tantangan

Meski terikat erat dalam catatan sejarah penyebaran agama Islam, tetapi fakta bahwa Islam adalah ajaran minoritas di Tiongkok dan kurangnya literasi maupun referensi yang hanya menambah kecurigaan masyarakat Tiongkok secara luas bahwa Islam adalah ajaran agama yang penuh dengan kekerasan dan peperangan; membuat upaya diplomasi yang dilakukan kedua belah pihak tidak mulus.

Menurut Xu Yihua, pola politik Tiongkok saat ini adalah *"powerful state, weak religion"*. Agama di Tiongkok mendapatkan perhatian dari masyarakat internasional karena mengalami peningkatan dari segi jumlah pengikut dan kebijakan pemerintah yang berpihak terhadap mereka. Tetapi Tiongkok masih jauh dari negara yang mengangkat sumber religiusnya menjadi sebuah aset dalam hubungan bernegara.³⁴

Dari sisi Indonesia, kebangkitan ekonomi dan politik Tiongkok secara global masih dianggap sebagai ancaman bagi sebagian besar masyarakat. Membanjirnya produk impor Tiongkok hampir di semua bidang membuat masyarakat menuduh bahwa negara Tiongkok adalah sumber dari kemunduran ekonomi Indonesia satu dekade terakhir. Kecurigaan ini bertambah rumit ketika kabar bahwa Tiongkok juga akan membawa kembali paham komunisme ke Indonesia. Isu membanjirnya tenaga kerja asing Tiongkok di Indonesia juga membuat masyarakat semakin resah. Masyarakat resah akan meningkatnya persaingan dalam mendapatkan pekerjaan.

Tantangan lain dalam diplomasi Islam antara Indonesia dan Tiongkok adalah masih adanya opini negatif terhadap kaum keturunan Tionghoa di Indonesia. Sebagian kecil kaum Tionghoa di Indonesia pada masa Soeharto menikmati berbagai fasilitas investasi sehingga menjadi sangat kaya. Sekelompok kecil ini akhirnya dianggap sebagai representasi seluruh etnis Tionghoa, sebagai kelompok yang memiliki kekuasaan dan punya kekayaan dengan cara yang culas. Kejatuhan Orde Baru pada 1998 membuat konflik ini semakin muncul di permukaan.

Tantangan terakhir adalah Indonesia berada dalam dilema identitas ganda dalam merumuskan strategi diplomasi publiknya.³⁵ Di satu sisi, Indonesia adalah negara kesatuan berdasar demokrasi Pancasila sekaligus negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Keterlibatan dan partisipasi aktif Indonesia dalam isu yang menyangkut masyarakat Muslim sangatlah dimengerti, bahkan diapresiasi oleh kalangan internasional. Tetapi di sisi lain, Indonesia tidak pernah menegaskan identitas Islam sebagai bahan perumusan kebijakan luar negeri. Di sinilah dilema terjadi. Indonesia tidak memiliki kewajiban untuk melandaskan kebijakan luar negerinya hanya berdasar pada pertimbangan satu agama tertentu, mengingat Indonesia adalah negara pluralis. Pemerintah Indonesia perlu menyeimbangkan antara menentukan isu strategis yang menjadi prioritas dan merespon isu yang dikehendaki oleh mayoritas publik dalam negeri.

Kesimpulan

Dari hasil temuan di lapangan dan kajian pustaka yang tersedia, maka penulis menyimpulkan beberapa poin simpulan sesuai dengan rumusan masalah yang ada. Pertama, diplomasi Islam Indonesia-Tiongkok mempengaruhi kedua negara dalam hal seni budaya dan praktik diplomasi.

Dalam seni dan budaya, jejak kebudayaan Tiongkok dan Muslim Tionghoa juga cukup banyak bertebaran di Indonesia, mulai dari bahasa, arsitektur, konsepsi spiritual dan keduniaan, nama-nama jalan, aneka aksesoris pakaian hingga nama makanan, serta bukti peninggalan purbakala Islam di Jawa. Laksamana Cheng Hoo memiliki peran besar dalam penyebaran seni dan budaya agama Islam kala itu. Nilai religius, ajaran, ibadah, dan cara hidup yang dibawa oleh para pedagang dan saudagar untuk berdagang ke suatu wilayah ternyata membawa perubahan dalam cara pandang maupun cara masyarakat bersosialisasi dengan sesama, begitu juga dengan kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya. Diplomasi agama yang dilakukan pemerintah Indonesia maupun pemerintah Tiongkok sama-sama bertujuan untuk tidak hanya membangun citra yang baik melalui penyebaran nilai-nilai perdamaian, keadilan, dan harmoni antar sesama umat beragama tetapi sebagai bentuk upaya aktor negara dan non negara menyampaikan identitas dirinya dalam pergaulan internasional. Hal itulah yang menjadi spirit diplomasi publik Indonesia dan Tiongkok.

Kedua, peran aktor negara menjadi sangat krusial ketika pendekatan yang diharapkan adalah *people-to-people*. Maka, terdapat dua peran aktor non-negara dalam diplomasi Islam Indonesia-Tiongkok: pertama, sebagai mitra dialog dan kerjasama; kedua sebagai promotor. Tiongkok telah menunjukkan posisinya sebagai mitra dialog utama bagi Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan telah banyaknya dialog, kerjasama, maupun kunjungan pimpinan dan tokoh agama Indonesia ke Tiongkok. Poin kerjasama antar warga diwujudkan dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan sektor strategis lainnya. Sementara itu, peran promotor dilakoni dengan senantiasa memperkenalkan nilai-nilai Islam yang damai. Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama menjadi promotor utama dalam menyebarkan nilai Islam Moderat seperti yang selama ini dijalankan di Indonesia yang menitikberatkan pada pendidikan akhlak dan pada akhirnya dapat menjadi formula tepat untuk mencegah ekstrimisme.

Ketiga, peluang dan tantangan diplomasi Islam Indonesia-Tiongkok dapat disimpulkan dalam beberapa poin utama. Pertama, diplomasi Islam kedua negara dapat terus diperdalam mengingat kedua pemimpin telah sepakat meningkatkan hubungan antar warganya. Kesepahaman antara masyarakat Indonesia dan Tiongkok sangatlah penting karena sejatinya semangat yang diusung oleh Jalur Sutera Baru adalah bersatunya tidak hanya wilayah tetapi terjalinnya komunikasi antara negara-negara dalam kawasan jalur tersebut. Pendekatan *people-to-people* melalui bidang budaya dan

pendidikan dengan mengenalkan Islam tidak dalam perspektif teologi, tetapi dalam perspektif budaya. Kedua, dengan terpeliharanya hubungan baik kedua negara melalui pendekatan *people-to-people*, maka hal ini akan membawa hasil yang positif pula terhadap bidang-bidang yang lain seperti ekonomi, sosial dan budaya. Ketiga, Islam adalah ajaran minoritas di Tiongkok dan kurangnya literasi maupun referensi membuat masyarakat Tiongkok secara luas hanya memahami bahwa Islam adalah ajaran agama yang penuh dengan kekerasan dan peperangan.

Keempat, dari sisi Indonesia, kebangkitan ekonomi dan politik Tiongkok secara global masih dianggap sebagai ancaman bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Kelima, masih adanya opini negatif terhadap kaum keturunan Tionghoa di Indonesia. Pemerintah Indonesia seringkali dituduh membela kepentingan kelompok minoritas Tionghoa yang faktanya memiliki kekuatan besar dalam bidang ekonomi di Indonesia.

Keenam, Indonesia berada dalam dilema identitas ganda dalam merumuskan strategi diplomasi publiknya. Di satu sisi, Indonesia adalah negara kesatuan berdasar demokrasi Pancasila sekaligus negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Tetapi di sisi lain, Indonesia tidak pernah menegaskan identitas Islam sebagai bahan perumusan kebijakan luar negeri, sehingga sebagai negara pluralis, Indonesia tidak memiliki kewajiban untuk melandaskan kebijakan luar negerinya hanya berdasar pada pertimbangan satu agama tertentu. Pemerintah Indonesia perlu menyeimbangkan antara menentukan isu strategis yang menjadi prioritas dan merespon isu yang dikehendaki oleh mayoritas publik dalam negeri.

Catatan Kaki

¹ R.P. Barston. *Modern Diplomacy*, (New York: Routledge, 2006), 3

² Jan Melissen, *The New Public Diplomacy, Soft Power in International Relations*, Hampshire: Palgrave Macmillan, 2005, 7

³ Xu Yihua, *Religion and China's Public Diplomacy in the Era of Globalization*, *Journal of Middle Eastern and Islamic Studies (in Asia)*, Vol.9 No.4, 2015, 16

⁴ Joseph Nye Jr, *Ibid*, 7

⁵ Tan Ta Sen, *Cheng Ho Penyebar Islam dari China ke Nusantara*, Jakarta: Kompas, 2010, 109

⁶ Juyan Zhang, "China's Faith Diplomacy", dalam Philip Seib, *Religion and Public Diplomacy*, New York: Palgrave Macmillan, 2013, 81

⁷ Burnadi Hasan, *Indahnya Perbedaan*, Surabaya, 25

⁸ Anon, “Masjid Huisheng Berdiri Sejak Masa Utsman Bin Affan”, Lihat di <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-digest/17/01/17/ojw41p313-masjid-uaisheng-berdiri-sejak-masa-utsman-bin-affan>, Diakses tanggal 15 Oktober 2018

⁹ Juyan Zhang. Op. Cit.

¹⁰ Tan Ta Sen, *Ibid.*, 115

¹¹ *Ibid.*

¹² Arum Priadi, “Menyatu di Kota Nanjing dari Penggalangan Dana Hingga Melihat Kapal Zheng He Chengho” Lihat di <https://www.kabarmutiongkok.org/berita/menyatu-di-kota-nanjing-dari-penggalangan-dana-gempa-hingga-melihat-kapal-zheng-he-chengho>, Diakses tanggal 29 Oktober 2018

¹³ Ipong Hembing Putra, Laksamana Cheng Hoo, Majalah Cheng Hoo Oktober 2018, 42

¹⁴ Rezza Maulana, *Tionghoa Muslim/Muslim Tionghoa*, Yogyakarta: Impulse, 2010, 23

¹⁵ Sumanto Al-Qurtubi, Arus Tiongkok-Jawa Islam, Bongkar Sejarah Atas Peranan Tionghoa dalam Penyebaran Agama Islam di Nusantara Abad XV&XVI, Yogyakarta: INTI, 2013, 16

¹⁶ Choirul Mahfud, “Hubungan Islam Tionghoa dan Islam Nusantara”, Lihat di <http://lp3.um.ac.id/berita-577-hubungan-islam-tionghoa-dan-islam-nusantara-htm> Diakses tanggal 19 Agustus 2018

¹⁷ Anon. “Masjid Cheng Ho Jejak Syiar Islam Sang Laksamana Tiongkok, Lihat di <http://presidenri.go.id/berita-aktual/masjid-cheng-ho-jejak-syiar-islam-sang-laksamana-tiongkok.html>, Diakses tanggal 12 Oktober 2018

¹⁸ Rini Friastuti, ”Berbaurnya Islam dan Etnis Tionghoa di Indonesia”, Lihat di <https://news.detik.com/berita/3313136/berbaurnya-islam-dan-etnis-tionghoa-di-indonesia>, Diakses tanggal 15 Oktober 2018

¹⁹ Anon, “Penuhi Undangan Dubes China Berikut Agenda Ketua Umum PP Muhammadiyah di China”, Lihat di <http://www.suaramuhammadiyah.id/2018/09/12/penuhi-undangan-dubes-china-berikut-beberapa-agenda-ketua-umum-pp-muhammadiyah-di-china/>, Diakses tanggal 27 Oktober 2018

²⁰ Muchlison, “Kedubes China-PBNU Kerjasama Bagikan Air Bersih”, Lihat di <http://www.nu.or.id/post/read/90811/kedubes-china-pbnu-kerjasama-bangun-sarana-air-bersih>. Diakses tanggal 12 Oktober 2018

²¹ *Ibid.*

²² Haryanto Satriyo. Wawancara. Tanggal 5 Oktober 2018

²³ *Ibid.*

²⁴ Ahmad Najib Burhani. “Absennya Mhammadiyah”, Lihat di <https://diktilitbangmuhammadiyah.org/id/absennya-muhammadiyah/>, Diakses pada 30 Oktober 2018

²⁵ Anon, “Kunjungi Masjid Niujie Beijing, Gus Dur Pertama Jokowi Kedua”, Lihat di <https://nasional.tempo.co/read/875261/kunjungi-masjid-niujie-beijing-gus-dur-pertama-jokowi-yang-kedua/full&view=ok>, Diakses tanggal 28 Oktober 2018

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Anon. “Sambangi Muhammadiyah Dubes Republik Rakyat Tiongkok Sampaikan Perkembangan Islam”, Lihat di <http://www.suaramuhammadiyah.id/2017/02/21/sambangi-muhammadiyah-dubes-republik-rakyat-tiongkok-sampaikan-perkembangan-islam/> Diakses tanggal 28 Agustus 2018

²⁸ Ali Romdhoni, “NU Tiongkok dan Gagasan Persaudaraan Muslim Indonesia China”, Lihat di <https://geotimes.co.id/kolom/agama/nu-tiongkok-dan-gagasan-persaudaraan-muslim-indonesia-china/>, Diakses tanggal 27 Oktober 2018

²⁹ Jan Melissen, *Ibid.*, 5

³⁰ *Ibid.*

³¹ Iva Rachmawati, *Indonesian Public Diplomacy: Preserving State Existance through Sharing Identities to Gain Mutual Understanding*, Global dan Strategis, Th.11 No.1, 2017, 55

³² A.A.B.Perwita, dan Y.M. Yani, Pengantar Ilmu Hubungan Internasional. Bandung: Rosda, 2006, 25.

³³ Gustaaf Geeraerts, *Analyzing Non-State Actors in World Politics*, Pole Paper Series, Vol. 1, No. 4, 1995, Lihat di <http://poli.vub.ac.be/publi/pole-papers/pole0104.htm>, Diakses tanggal 12 Oktober 2018

³⁴ Anon, “Muhammadiyah dan Menteri Urusan Agama China Sepakati Kerjasama Bidang Agama dan Pendidikan”, Lihat di <http://www.muhammadiyah.or.id/id/news-14779-detail-muhammadiyah-dan-menteri-urusan-agama-china-sepakati-kerjasama-dalam-bidang-agama-dan-pendidikan.html>, Diakses tanggal 27 Oktober 2018

³⁴ Xu Yihua, *Ibid.*, 20

³⁵ Rizal Sukma, “Soft Power and Public Diplomacy: The Case of Indonesia”, dalam Sook Jong Lee dan Jen Melissen, *Public Diplomacy and Soft Power in East Asia*, New York: Palgrave Macmillan, 2012, 110

Daftar Referensi

Buku

Al-Qurtubi, Sumanto. *Arus Tiongkok-Jawa Islam, Bongkar Sejarah Atas Peranan Tiongbo dalam Penyebaran Agama Islam di Nusantara Abad XV&XVI*. Yogyakarta: INTI. 2013.

Barston, R.P. *Modern Diplomacy*. New York: Routledge. 2006.

Berridge, G.R. *Diplomacy: Theory and Practice*. New York: Palgrave. 2010.

Chaterine, M dan B.G. Rossman. *Designing Qualitative Research*. London: Sage Publication. 1989

Constantinou C. M. *Sage Handbook of Diplomacy*. London: Sage. 2016.

Creswell, John W. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset (Terj.)*. Jakarta: Pustaka Pelajar. 2015.

- Hasan, Burnadi. *Indahnya Perbedaan*. Surabaya: PITI dan Yayasan Haji Muhammad Cheng Hoo. 2016.
- Iqbal, Afzal. *Diplomacy In Early Islam*. Lahore: Qaumi Press. 2000.
- Johnston, Douglas. *Faith-based Diplomacy, Trumping Realpolitik*. New York: Oxford University Press. 2003
- Lee, Sook Jong, J. Melissen. *Public Diplomacy and Soft Power in East Asia*. New York: Palgrave Macmillan. 2012.
- Maleong, Lexi. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rosda Karya. 1994.
- Manheim, Jarol B. *Strategic Public Diplomacy: The Evaluation of Influence*. New York: Oxford University Press. 1990.
- Marie-Louisa, Frick, A. Muller (edt). *Islam and International Law: Engaging Self-Centrism from a Plurality of Perspectives*. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers. 2013.
- Maulana, Rezza. *Tionghoa Muslim/Muslim Tionghoa*. Yogyakarta: Impulse. 2010.
- Mellisen, Jan. *The New Public Diplomacy*. Hampshire: Palgrave Macmillan. 2006.
- Nye Jr, Joseph. *Soft Power: The Means to Success in World Politics*. New York: Public Affairs. 2004.
- Perwita, A.A.B., Y.M. Yani. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: Rosda Karya. 2006.
- Seib, Philip. *Religion and Public Diplomacy*. New York: Palgrave Macmillan. 2013.
- Sen, Tan Ta. *Cheng Ho Penyebar Islam dari China ke Nusantara*. Jakarta: Kompas. 2010.

Jurnal

- Geeraerts, Gustaaf. "Analyzing Non-State Actors in World Politics". *Pole Paper Series*, Vol.1, No.4. 1995.
- Rachmawati, Iva. "Indonesian Public Diplomacy: Preserving State Existence through Sharing Identities to Gain Mutual Understanding". *Global dan Strategis*, Th.11 No.1. 2017.

Yihua, Xu. "Religion and China's Public Diplomacy in the Era of Globalization", *Journal of Middle Eastern and Islamic Studies (in Asia)*, Vol.9 No.4. 2015.

Yihua, Xu. "Religion and International Relations in the Age of Globalization", *Journal of Middle Eastern and Islamic Studies (in Asia)*, Vol.6 No.4. 2012.

Majalah

Putra, Ipong Hembing. "Laksamana Cheng Hoo". *Majalah Cheng Hoo*, Edisi 99, 15 Agustus -15 Oktober 2018.

Wawancara

Satriyo, Haryanto. Ketua Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) Jawa Timur. Tanggal 5 Oktober 2018.

Artikel Elektronik

Anon. "Tradisi Diplomasi dalam Sejarah Islam". [Diakses di <https://www.republika.co.id/berita/ensiklopedia-islam/khazanah/10/11/25/148728-tradisi-diplomasi-dalam-sejarah-islam>] tanggal 30 Oktober 2018

Anon. "Masjid Huisheng Berdiri Sejak Masa Utsman Bin Affan". [Diakses di <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-digest/17/01/17/ojw41p313-masjid-uaisheng-berdiri-sejak-masa-utsman-bin-affan>] tanggal 15 Oktober 2018

Anon. "Masjid Cheng Ho Jejak Syiar Islam Sang Laksamana Tiongkok" [Diakses di <http://presidenri.go.id/berita-aktual/masjid-cheng-ho-jejak-syiar-islam-sang-laksamana-tiongkok.html>] tanggal 12 Oktober 2018

Anon. "Penuhi Undangan Dubes China Berikut Agenda Ketua Umum PP Muhammadiyah di China". [Diakses di <http://www.suaramuhammadiyah.id/2018/09/12/penuhi-undangan-dubes-china-berikut-beberapa-agenda-ketua-umum-pp-muhammadiyah-di-china>] tanggal 27 Oktober 2018

- Anon. "PBNU Kenalkan Islam Moderat ke Tiongkok" [Diakses di <http://www.tribunnews.com/nasional/2016/04/21/pbnu-kenalkan-islam-moderat-ke-tiongkok>] tanggal 27 Oktober 2018
- Anon. "Tiongkok Sediakan 10 Beasiswa Khusus untuk Mahasiswa NU" [Diakses di <http://www.radarcirebon.com/tiongkok-sediakan-10-beasiswa-khusus-untuk-mahasiswa-nu.html>] tanggal 28 Agustus 2018
- Anon. "Kunjungi Masjid Niujie Beijing, Gus Dur Pertama Jokowi Kedua", Lihat di <https://nasional.tempo.co/read/875261/kunjungi-masjid-niujie-beijing-gus-dur-pertama-jokowi-yang-kedua/full&view=ok>, Diakses tanggal 28 Oktober 2018
- Anon. "Sambangi Muhammadiyah Dubes Republik Rakyat Tiongkok Sampaikan Perkembangan Islam" [Diakses di <http://www.suaramuhammadiyah.id/2017/02/21/sambangi-muhammadiyah-dubes-republik-rakyat-tiongkok-sampaikan-erkembangan-islam/>] tanggal 28 Agustus 2018
- Anon. "Kunjungi PP Muhammadiyah, Dubes Cina Bahas Kerjasama dalam Bidang Pendidikan hingga Kesehatan" [Diakses di <http://www.muhammadiyah.or.id/id/news-14345-detail-kunjungi-pp-muhammadiyah-dubes-cina-bahas-kerjasama-dalam-idang-pendidikan-hingga-kesehatan.html>] tanggal 28 Agustus 2018
- Burhani, Ahmad Najib. "Absennya Muhammadiyah". [Diakses di <https://diktilitbangmuhammadiyah.org/id/absennya-muhammadiyah>] tanggal 30 Oktober 2018
- Friastuti, Rini. "Berbaurnya Islam dan Etnis Tionghoa di Indonesia" [Diakses di <https://news.detik.com/berita/3313136/berbaurnya-islam-dan-etnis-tionghoa-di-indonesia>] tanggal 15 Oktober 2018
- Friedman, David. "Islamic International Law". [Diakses di [http://www.daviddfriedman.com/Academic/Course_Pages/legal_systems_very_different_12/Papers_12/Islamic International Law_Nazzaro_12.htm](http://www.daviddfriedman.com/Academic/Course_Pages/legal_systems_very_different_12/Papers_12/Islamic%20International%20Law_Nazzaro_12.htm)] pada 1 Oktober 2018
- Mahfud, Choirul. "Hubungan Islam Tionghoa dan Islam Nusantara". [Diakses di <http://lp3.um.ac.id/berita-577-hubungan-islam-tionghoa-dan-islam-nusantara-htm>] tanggal 19 Agustus 2018

- Mohammad, Zafor. "Diplomacy in Islam". [Diakses di <http://www.islamdaily.org/en/islam/11828.article.htm>] pada 4 Oktober 2018
- Muchlison, "Kedubes China-PBNU Kerjasama Bagikan Air Bersih" [Diakses di <http://www.nu.or.id/post/read/90811/kedubes-china-pbnu-kerjasama-bangun-sarana-air-bersih>] tanggal 12 Oktober 2018
- Nurjamil, "Makin Populer Begini Perkembangan Islam di Negeri Tirai Bambu" [Diakses di <https://www.gomuslim.co.id/read/news/2017/01/05/2793/makin-populer-begini-perkembangan-islam-di-negeri-tirai-bambu.html>] tanggal 12 Oktober 2018
- Piscatori, James. "International Relations and Diplomacy". [Diakses di <http://www.oxfordislamicstudies.com/article/opr/t236/e0375>] tanggal 10 Oktober 2018
- Priadi, Arum. "Menyatu di Kota Nanjing dari Penggalangan Dana Hingga Melihat Kapal Zheng He Chengho". [Diakses di <https://www.kabarmutiangkok.org/berita/menyatu-di-kota-nanjing-dari-penggalangan-dana-gempa-hingga-melihat-kapal-zheng-he-chengho>] tanggal 29 Oktober 2018
- Romdhoni, Ali. "NU Tiongkok dan Gagasan Persaudaraan Muslim Indonesia China" [Diakses di <https://geotimes.co.id/kolom/agama/nu-tiongkok-dan-gagasan-persaudaraan-muslim-indonesia-china/>] tanggal 27 Oktober 2018
- Sabandar, Switzy. "Hasil Pertemuan PBNU Muhammadiyah Indonesia Tionghoa di Yogya" [Diakses di <https://www.liputan6.com/regional/read/3214716/hasil-pertemuan-pbnu-muhammadiyah-indonesia-tionghoa-di-yogya>] tanggal 27 Oktober 2018
- Santoso, Bangun. "Intel China Temui Tokoh NU Minta Bantuan Bendung ISIS" [Diakses di <https://www.liputan6.com/news/read/2170830/intel-china-temui-tokoh-nu-minta-bantuan-bendung-isis>] tanggal 28 Agustus 2018